

1. Perkembangan inflasi daerah dan atau perkembangan harga barang kebutuhan pokok dan penting, barang lainnya dan jasa serta risiko ke depan.

Kabupaten Kepulauan Anambas termasuk daerah yang melakukan pemantauan dan perhitungan Indeks Perkembangan Harga (IPH). IPH adalah indeks yang mengukur perubahan harga-harga komoditas pangan yang dapat dipengaruhi oleh kebijakan pemerintah daerah. Pemerintah Daerah Kepulauan Anambas dapat melakukan pemantauan perkembangan Harga dan Stok dalam kurun waktu rerata per-triwulanan. Berikut ini adalah 22 komoditas pangan (*volatile foods*) Kabupaten Kepulauan Anambas yang dipantau, diantaranya : Beras, Kedelai, Cabe, Bawang Merah, Bawang Putih, Gula Pasir, Minyak Goreng, Tepung Terigu, Daging Sapi, Daging Ayam, Telur, Ikan Teri, Susu Kental Manis, Garam Halus, Kacang Hijau, Kacang Tanah, Mie Instant, Bawang Bombay, Tahu, Tempe, Pisang Ambon, dan Jeruk Kalimantan.

Perkembangan Harga *Calendar to Calendar (CtC) volatile foods* di Kabupaten Kepulauan Anambas pada Triwulan I Tahun 2024 berada angka rata-rata fluktuasi 0,61%. Jika target Fluktuasi Tahunan sebesar 0,53%, maka angka *CtC* ini lebih tinggi dari target fluktuasi sebesar 0,08%. Namun situasi perekonomian di masih terpantau aman dan kondusif. Berikut merupakan grafik IPH 22 komoditas barang kebutuhan pokok dan barang penting (Bapokting) yang dipantau di Kabupaten Kepulauan Anambas.

Dengan adanya pemantauan IPH, diharapkan dapat membantu pemerintah daerah dalam mengendalikan inflasi dan menjaga stabilitas harga-harga pangan. IPH juga dapat menjadi salah satu indikator kesejahteraan masyarakat, karena pangan merupakan kebutuhan pokok yang harus dipenuhi. IPH juga dapat menjadi bahan masukan bagi pemerintah pusat dalam merumuskan kebijakan makroekonomi yang berdampak pada inflasi.

Dokumentasi Kegiatan Pemantauan Harga dan Stok di sejumlah Pasar di Tarempa dan Pemantauan Aktifitas Bongkar Muat di Pelabuhan Tarempa oleh Dinas Koperasi Usaha Mikro, Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Kepulauan Anambas.

2. Identifikasi permasalahan pengendalian inflasi di daerah.

1. Letak Geografis

Kepulauan Anambas merupakan daerah kepulauan dengan cakupan $\pm 98\%$ terdiri dari perairan dan hanya $\pm 2\%$ daratan, terdiri dari 255 pulau yang tersebar di Kabupaten Kepulauan Anambas. Berdasarkan data moda transportasi laut yang berlayar di perairan Anambas dari Instansi Syahbandar Tarempa tahun lalu, Kepulauan Anambas masih melakukan distribusi logistik dari daerah/kota luar ($\pm 90\%$ dari kabupaten/kota terdekat).

Anambas bukan merupakan daerah surplus bahan pokok dan barang penting, khususnya pada komoditas kebutuhan-kebutuhan pokok (sembako). Pada sektor ketahanan pangan, Pemerintah Daerah melalui Dinas Perikanan, Pertanian dan Pangan masih menemukan kendala aktual di lapangan, minat masyarakat Anambas akan bertani dan bercocok tanam dinilai sangat kurang. Hal ini bisa dilihat dari perspektif sosial budaya yang ditunjukkan dengan kenyataan bahwa sebagian besar masyarakat Anambas bermukim dan tinggal di daerah pesisir dan sebagian besar masyarakat Anambas bermata pencaharian sebagai nelayan. Kondisi cuaca ekstrim juga memberikan dampak negatif terhadap hasil produksi

pertanian lokal.

2. Sarana Prasarana

Sarana dan Prasarana penunjang distribusi masih tergolong belum memadai, hal ini disebabkan karena sistem bongkar muat barang (*dwellling time*) terbesar di Pusat Kota Tarempa masih belum terurai dengan baik. Pada Kondisi-kondisi tertentu seperti cuaca buruk, masalah teknis dan keterlambatan kapal dapat berpotensi memberikan efek domino pada aktifitas bongkar muat di pelabuhan. Waktu tunggu aktifitas bongkar muat rata-rata memakan waktu mencapai 14 hari kalender. Penyebab utama lamanya waktu bongkar muat ini disebabkan karena:

1. Keterbatasan Tenaga kerja Bongkar Muat;
2. Di Lokasi Pelabuhan Tarempa masih belum memiliki sarana pergudangan;
3. Jalur Distribusi dalam kota yang sangat sempit dan memakan waktu lama untuk bongkar muat dengan volume sekitar 1m^3 (menggunakan moda transportasi kendaraan Roda 3);
4. Belum dimanfaatkannya Gudang logistik sebagai sarana untuk memperlancar distribusi; dan

Belum selesainya Pembangunan Pelabuhan Gudang Logistik Teluk Ret.

3. Pelaksanaan kebijakan pengendalian inflasi di daerah.

Upaya TPID Pemerintah Kabupaten Kepulauan Anambas pada Triwulan II Tahun 2024 yang telah dilaksanakan pada Triwulan II Tahun 2024, yakni :

1. **Optimalisasi Program Unggulan dan Pelaksanaan Tugas TPID Kabupaten Kepulauan Anambas dengan Tema “Gerakan Menanam Aneka Hortikultura Anambas (GEMAH ANAMBAS TAHUN 2024).**
2. **Gerakan Pangan Murah (GPM) 23 Mei 2024.** Sepanjang Tahun 2024, Gerakan Pangan Murah di Kabupaten Kepulauan Anambas terhitung telah dilaksanakan selama 1 kali, bertepatan dengan Perayaan Hari Jadi Kabupaten Kepulauan Anambas yang ke-16 tanggal 23 Mei 2024 di Halaman Taman Bermadah, Tarempa. Sumber dana pelaksanaan kegiatan GPM berasal dari Dana dekonsentrasi dengan Dana Dekonsentrasi sebanyak 2 (satu) titik. Keikutsertaan vendor mitra pemasok terbanyak adalah BULOG Vendor Beras, telur ayam, minyak goreng, gula konsumsi, cabe rawit, cabe merah, cabe hijau dan sayur-sayuran segar. Total terdapat 17 item komoditas yang dijual dalam kegiatan ini dan Omset Kegiatan tercatat sebesar Rp 7.866.000,-.

4. Evaluasi kebijakan pengendalian inflasi di daerah.

**Perangkat
Daerah**

**Evaluasi TW II Tahun
2024**

**Renaksi dan Target
TW III Tahun 2024**

**Dinas
Perikanan,
Pertanian, dan
Pangan Kab.
Kep. Anambas
KKA**

- 1 Pelaksanaan sosialisasi B2SA dan edukasi gerakan menanam ke masyarakat dan di sekolah pada TW II 2024 dapat dioptimalkan melalui sinkronisasi dengan Balai Penyuluh Pertanian pada masing-masing wilayah. Setiap kemajuan dari pelaksanaan program kegiatan agar dapat lebih terdokumentasi dan terukur.
- 2 Gerakan Pangan Murah (GPM) tahap ke-1. 17 Komoditi Pangan.

Mengoptimalkan program kegiatan yang sedang berlanjut (program Gerakan menanam di pekarangan) dan Pelaksanaan Pembagian Benih dan Perlengkapan menanam dengan rincian:

- Pupuk kompos: 500 kg
- Polybag: 35 kg
- Pupuk NPK 25 kg
- Benih Cabe Besar: 2 sachet
- Benih Cabe Rawit: 3 sachet

Gerakan Pangan Murah (GPM) Tahap-2 di TW III Tahun 2024, dengan Target 20 Komoditi Pangan.

**Dinas Koperasi
Usaha Mikro
Perindustrian,
dan
Perdagangan
kab. Kep.
Anambas**

- 1 Melakukan Koordinasi Pantauan Harga dan stok di 8 Distributor yang ada di wilayah Kabupaten Kepulauan Anambas.
- 2 Pemanfaatan Aplikasi Sistem Informasi (SIMBOK) Sistem Informasi pantauan harga dan stok yang dapat diakses oleh semua pihak. (dalam Proses)

Pemantauan Harga dan Stok dan Pengumpulan informasi stabilitas harga dan ketahanan pangan, untuk dilaporkan ke Kementerian Perdagangan Republik Indonesia dan Provinsi. Melakukan *data updating* pada laman SP2KP.

Memperkuat Sinkronisasi secara berkelanjutan dengan Inspektorat Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas dan peningkatan kualitas data dan informasi secara berkelanjutan.

- Dalam tahap
Pembahasan bersama
dengan dinas terkait

TPID secara sinergis berupaya menjaga kestabilan dan ketersediaan barang pokok dan barang penting yang beredar. Penyediaan diseminasi data integratif sektoral meliputi stok Bapokting

daerah oleh Perangkat Daerah terkait, serta memberikan pelaporan rutin dan berkala terkait capaian program kerja inflasi daerah rutin kepada Inspektorat Daerah dan Sekretariat TPID.

3. Kelancaran Distribusi

TPID secara berkesinambungan tetap mengawal program **“Peningkatan Sistem Logistik secara Terintegrasi pengalihan lokus Pelabuhan ke Area Logistik Teluk Ret”**.

Pengalihan dilakukan secara parsial dengan penggunaan logistik dan pemanfaatan sisi Pelabuhan Teluk Ret untuk transportasi antar pulau. Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa dapat memaksimalkan perannya dalam memberikan pembinaan yang lebih intensif dengan penyertaan modal dana desa, pendampingan pelatihan pengelolaan keuangan yang berbasis aplikasi serta mendorong perencanaan bantuan stimulus fiskal untuk BUMDES yang dinilai berhasil dan layak dalam operasional BUMDES.

4. Komunikasi Efektif

TPID mengikuti Rapat Koordinasi arahan Pemerintah Pusat yang dipimpin Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia dan diikuti oleh seluruh Kepala

Perangkat Daerah dan/atau Badan/Kantor Pengampu Program TPID. Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kabupaten Kepulauan Anambas dapat berperan dalam segi publikasi dan koordinasi dengan daerah potensial surplus pangan.